

Analisis Kesejahteraan Petani Tembakau Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan

*Ach Saifullah, Asyari, Mahalli Andriyanto, Farahdilla kutsiyah

Universitas Islam Negri Madura

*Email: achsaifullah003@gmail.com, viqta333@gmail.com,
mahalliandriyanto@gmail.com, keindahanmaduraku@gmail.com,

Received: 01/10/2025 Revised: 22/11/2025 Accepted: 24/11/2025 Available Online: 25/11/2025 Published: 25/11/2025

Abstract

The paradox of the development of the tobacco sector in Pamekasan Regency can be seen from the increase in planting area and productivity from 22.3 thousand hectares in 2023 to 31.1 thousand hectares in 2024 which is not directly proportional to the welfare of farmers. This study aims to analyze the structural and cultural roots that cause asynchrony between production growth and welfare improvement. Using qualitative methods with case study designs, data were collected through in-depth interviews, field observations in four tobacco center villages, and document analysis. The data was analyzed thematically by combining the Agrarian Political Economy framework, Welfare Theory, and Sustainable Livelihood Framework (SLF). The results of the study show that inequality in the political economy structure including the dominance of middlemen, weak bargaining positions of farmers, ineffective allocation of DBHCHT, and distortion of access to production inputs are the main causes of welfare stagnation. In addition, local cultural factors create a cultural lock-in that reinforces farmers' systemic dependence on traditional marketing networks. These findings indicate the need for policy reforms that are transformative, targeted, and sensitive to socio-cultural dynamics in order to improve the welfare of tobacco farmers in a sustainable manner.

Keywords: *Farmers' Welfare, Agrarian Political Economy, Pamekasan Tobacco.*

Abstrak

Paradoks pembangunan sektor tembakau di Kabupaten Pamekasan tampak dari meningkatnya luas tanam dan produktivitas dari 22,3 ribu hektare pada 2023 menjadi 31,1 ribu hektare pada 2024 yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar struktural dan kultural yang menyebabkan ketidaksinkronan antara pertumbuhan produksi dan peningkatan kesejahteraan. Menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan di empat desa sentra tembakau, dan analisis dokumen. Data dianalisis secara tematik dengan memadukan kerangka Ekonomi Politik Agraria, Teori Kesejahteraan, dan Sustainable Livelihood Framework (SLF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan struktur ekonomi politik meliputi dominasi tengkulak, lemahnya posisi tawar petani, alokasi DBHCHT yang tidak efektif, serta distorsi akses terhadap input produksi menjadi penyebab utama stagnasi kesejahteraan. Selain itu, faktor budaya lokal menciptakan cultural lock-in yang memperkuat ketergantungan sistemik petani terhadap jaringan pemasaran tradisional. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi kebijakan yang transformatif, tepat sasaran, dan sensitif terhadap dinamika sosial-budaya agar kesejahteraan petani tembakau dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesejahteraan Petani, Ekonomi Politik Agraria, Tembakau Pamekasan.



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini diarahkan pada sektor tembakau di Kabupaten Pamekasan yang masih menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian agraris. Berdasarkan data terbaru, luas areal tanam tembakau pada tahun 2023 mencapai sekitar 22,3 ribu hektare dan meningkat signifikan menjadi 31,1 ribu hektare pada tahun 2024, dengan total produksi mendekati 20 ribu ton (Siagian, 2024). Fakta ini menunjukkan ketergantungan rumah tangga tani terhadap komoditas tembakau sebagai sumber utama pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja lokal. Penelitian ini menjadi relevan karena peningkatan luas tanam dan produktivitas ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berakar pada tingginya biaya produksi, margin keuntungan yang tipis, serta risiko eksternal seperti serangan hama dan anomali iklim yang menurunkan kualitas panen. Selain itu, faktor sosial-budaya menambah kompleksitas persoalan. Bercocok tanam tembakau bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga tradisi turun-temurun yang membentuk identitas sosial keluarga dan komunitas (Hidayat & Arifah, 2023). Hal ini menjadikan diversifikasi usaha atau peralihan komoditas sulit dilakukan tanpa strategi yang peka terhadap aspek budaya. Intervensi kebijakan pun sering kali menghadapi resistensi di tingkat komunitas, sementara di sisi lain, kebijakan fiskal seperti pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta penetapan biaya pokok produksi belum sepenuhnya menyasar kepentingan petani kecil (Hayati & Maisaroh, 2019).

Dari perspektif teoritis, penelitian ini dapat dijelaskan melalui pendekatan ekonomi politik agraria dan teori kesejahteraan rumah tangga tani. Ekonomi politik agraria menekankan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh aspek produksi dan pasar, tetapi juga oleh struktur kebijakan dan distribusi sumber daya yang melingkupinya (Rachman, 2017). Sementara itu, teori kesejahteraan rumah tangga tani menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak semata diukur dari produktivitas lahan, melainkan juga stabilitas pendapatan, akses terhadap input produksi, serta kemampuan adaptasi terhadap fluktuasi harga pasar (Ketaren & Rangkuty, 2021). Dengan kerangka ini, faktor regulasi pupuk bersubsidi yang eksklusif, volatilitas harga panen, serta dominasi tengkulak dapat dipahami sebagai determinan penting yang memengaruhi kerentanan ekonomi petani tembakau Pamekasan.

Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan analisis komprehensif yang tidak hanya menyoroti dimensi ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan kebijakan. Dengan data terbaru tahun 2023–2024, penelitian ini menyajikan gambaran aktual mengenai dinamika tembakau di Pamekasan, termasuk paradoks antara besarnya kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah dan rapuhnya kesejahteraan rumah tangga petani. Analisis yang peka budaya sekaligus berbasis teori ekonomi politik agraria diharapkan mampu menawarkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi petani tembakau di masa depan.

KAJIAN TEORI

Penelitian mengenai sektor tembakau di Kabupaten Pamekasan tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap paradoks yang terjadi: di satu sisi, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal luas tanam dan produktivitas, namun di sisi lain, peningkatan tersebut tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan petani. Untuk menganalisis kompleksitas permasalahan ini, kajian teori ini akan merujuk pada dua teori utama yang disebutkan dalam artikel, yaitu Teori

Kesejahteraan (Welfare Theory) dan Teori Livelihood (Sustainable Livelihood Framework), serta memperkuatnya dengan perspektif Ekonomi Politik Agraria.

1. Teori Kesejahteraan (Welfare Theory)

Teori Kesejahteraan klasik seringkali memusatkan perhatian pada utilitas atau kepuasan yang diperoleh individu dari konsumsi barang dan jasa (Adi, 2018). Dalam konteks pertanian, teori ini berevolusi untuk tidak hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan output atau produktivitas semata, tetapi juga pada stabilitas pendapatan, keamanan finansial, dan akses terhadap sumber daya (M.M, 2024).

Berdasarkan kesejahteraan petani tembakau Pamekasan tidak dapat diukur hanya dari tingginya produksi. Teori Kesejahteraan menuntut untuk melihat indikator yang lebih komprehensif, seperti:

- a) Kemampuan mengatasi gejala ekonomi: Tingginya biaya produksi dan margin keuntungan yang tipis menggerus pendapatan bersih petani.
- b) Akses terhadap input produksi: Regulasi pupuk bersubsidi yang eksklusif menciptakan ketimpangan akses, yang pada akhirnya memengaruhi biaya dan profitabilitas.
- c) Perlindungan dari risiko: Petani sangat rentan terhadap guncangan eksternal seperti serangan hama dan anomali iklim, yang secara langsung menurunkan kualitas dan kuantitas panen, serta fluktuasi harga pasar (Bahri & Aprilianti, 2023).

Dengan demikian, kerangka Teori Kesejahteraan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengkritik pendekatan yang semata-mata produktivistik dan beralih kepada pendekatan yang melihat kesejahteraan sebagai suatu kondisi yang multidimensi dan rentan terhadap berbagai faktor eksternal.

2. Teori Livelihood Berkelanjutan (Sustainable Livelihood Framework - SLF)

Teori Livelihood, khususnya SLF yang dipopulerkan oleh DFID, memberikan lensa yang lebih operasional untuk memahami bagaimana rumah tangga petani memanfaatkan modal yang mereka miliki untuk membangun strategi penghidupan guna mencapai hasil yang berkelanjutan (Parmawati dkk., 2021). SLF mengidentifikasi lima jenis modal utama:

- a) Modal Manusia: Keterampilan, kesehatan, dan kemampuan kerja anggota keluarga.
- b) Modal Sosial: Jaringan sosial, kepercayaan, hubungan dengan tengkulak, serta norma dan tradisi (seperti budaya bertembakau yang turun-temurun).
- c) Modal Alam: Lahan seluas 22,3-31,1 ribu hektare, kualitas tanah, dan kondisi iklim.
- d) Modal Fisik: Infrastruktur, teknologi pertanian, dan akses ke fasilitas.
- e) Modal Finansial: Tabungan, akses kredit, dan pendapatan tunai dari penjualan tembakau (Fitria dkk., 2024).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa strategi livelihood rumah tangga petani Pamekasan sangat terpusat pada satu komoditas yaitu tembakau. Oleh karena itu, SLF membantu menjelaskan mengapa petani terus bertahan pada komoditas yang rentan, hal ini disebabkan oleh struktur modal dan strategi penghidupan mereka telah terikat dan dibangun di sekitarnya.

3. Teori Ekonomi Politik Agraria (*Agrarian Political Economy*)

Teori Ekonomi Politik Agraria berfungsi sebagai payung besar yang mengintegrasikan kedua teori di atas. Teori ini menekankan bahwa kondisi kesejahteraan dan pola livelihood rumah tangga petani tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dibentuk

oleh struktur kebijakan, politik, dan relasi kekuasaan yang lebih luas yang mengontrol distribusi sumber daya (Ketaren & Rangkyu, 2021).

Dalam konteks penelitian ini menjelaskan:

- a) Kebijakan Fiskal: Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum menyoar kepentingan petani kecil menunjukkan bagaimana kebijakan negara gagal mendistribusikan manfaat ekonomi dari sektor tembakau secara adil kepada produsen primer.
- b) Struktur Pasar: Dominasi tengkulak adalah cerminan dari struktur pasar yang timpang dan tidak kompetitif, di mana petani sebagai price-taker memiliki daya tawar yang sangat lemah.
- c) Kebijakan Input: Regulasi pupuk bersubsidi yang eksklusif merupakan bentuk dari kegagalan kebijakan publik dalam menjamin akses petani terhadap input produksi yang kritical.
- d) Resistensi terhadap Perubahan: Intervensi kebijakan yang menghadapi resistensi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan struktur sosial-budaya yang telah lama terbentuk, yang juga merupakan objek analisis ekonomi politik (Rachman, 2017).

Dengan 3 teori ini paradoks di kabupaten pamekasan yang menunjukkan produksi tembakau yang tinggi tetapi kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, dapat terjawab dikarenakan tingginya produksi tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan, karena struktur kebijakan dan ekonomi politik yang timpang (seperti dominasi tengkulak dan kebijakan fiskal yang tidak pro-petani) menghambat aliran manfaat ekonomi sampai ke tingkat petani, sementara strategi livelihood yang terfokus pada tembakau dan didukung oleh budaya yang kuat justru meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap berbagai guncangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menginvestigasi akar paradoks antara tingginya produksi tembakau dan rendahnya kesejahteraan petani di Kabupaten Pamekasan (Adiwijaya dkk., 2024). Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, menggabungkan wawancara mendalam dengan petani, tengkulak, dan perangkat desa, observasi lapangan terhadap proses produksi dan distribusi, serta analisis dokumen kebijakan dan data statistik daerah tahun 2023-2024.

Data dianalisis secara tematik dengan kerangka analisis yang mengintegrasikan tiga perspektif teoritis. Pertama, Teori Kesejahteraan digunakan untuk mengevaluasi indikator kesejahteraan non-moneter seperti stabilitas pendapatan dan ketahanan terhadap guncangan. Kedua, Kerangka Livelihood Berkelanjutan (SLF) dipakai untuk memetakan strategi penghidupan rumah tangga petani berdasarkan lima modal (alam, manusia, sosial, fisik, dan finansial). Ketiga dan yang menjadi payung utamanya, Perspektif Ekonomi Politik Agraria diterapkan untuk membedah struktur kekuasaan, kebijakan fiskal (seperti DBHCHT), dan relasi pasar yang timpang (seperti dominasi tengkulak) yang menghambat distribusi manfaat ekonomi hingga ke tingkat petani (Alaslan, 2023).

Secara ringkas, metode ini dirancang untuk membongkar kompleksitas masalah tidak hanya dari permukaan gejala ekonomi, tetapi hingga ke lapisan struktur sosial, budaya, dan politik yang menentukan nasib petani tembakau.

HASIL

Stabilitas Harga Tembakau

Berdasarkan serangkaian wawancara mendalam dan observasi lapangan di desa Bujur Tengah, Panglegur, Tlanakan, dan Sama Waru, penelitian ini berhasil mengungkap lapisan-lapisan kompleks di balik paradoks tingginya produksi tembakau dan rendahnya kesejahteraan petani. Temuan ini tidak hanya berkisar pada angka, tetapi lebih pada narasi perjuangan, jerat sistemik, dan kegagalan kebijakan yang dialami langsung oleh para petani.

Dalam observasi di pasar-pasar lelang desa, terlihat jelas sebuah relasi kuasa yang timpang. Petani datang dengan membawa hasil bumi mereka, bukan untuk menawarkan harga, tetapi untuk menerima harga yang telah ditetapkan oleh para tengkulak. Suasana ruang transaksi lebih mirip pengadilan di mana petani adalah pihak yang divonis, bukan mitra yang bernegosiasi. Bahasa tubuh mereka pasif; duduk menunggu, mendengarkan, dan akhirnya mengangguk menerima keputusan yang menentukan nasib ekonomi keluarga mereka untuk musim ini.

Bersama salah satu warga Desa Bujur tengah atas nama bapak Juari 59 tahun kami memberikan pertanyaan Bagaimana melihat posisi petani dalam menentukan harga jual tembakau pada saat panen, dan sejauh mana petani memiliki kendali dalam proses tawar-menawar harga di pasar? Lalu beliau mengkonfirmasi sebagai berikut:

“Kami ini seperti memegang barang mewah tapi tidak bisa menjualnya ke toko emas. Hanya ada satu pembeli di sini, yaitu tengkulak. Dia yang tahu berapa harga pasaran, kami tidak. Suatu kali saya coba tawar, dia bilang, ‘Ya silakan cari pembeli lain.’ Kami tidak punya pilihan. Uangnya harus cepat cair, untuk bayar utun-utun (hutang) selama masa tanam dan untuk makan sehari-hari. Jadi, berapapun harganya, asal tidak terlalu menyakitkan, terpaksa kami terima.”

Kutipan di atas mengindikasikan adanya struktur pasar oligopsonistik, di mana jumlah pembeli (tengkulak) yang terbatas menyebabkan petani tidak memiliki posisi tawar. Mekanisme pasar yang seharusnya memungkinkan negosiasi harga justru berubah menjadi sistem yang bersifat koersif. Ketergantungan petani terhadap kebutuhan likuiditas pasca-panen memperkuat posisi dominan tengkulak dalam menentukan harga, sementara keterbatasan akses informasi membuat petani tidak mampu melakukan resistensi ekonomi.

Hasil observasi peneliti di pasar lelang desa menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam transaksi tembakau berjalan satu arah. Petani hadir bukan sebagai pihak penentu, melainkan penerima keputusan harga. Gestur tubuh yang pasif menunggu, mendengarkan, dan mengangguk menandakan internalisasi ketidakberdayaan struktural. Fenomena ini menguatkan bahwa jerat tengkulak bukan sekadar relasi ekonomi, tetapi juga dominasi simbolik dalam praktik keseharian petani.

Tembakau Bagian Dari Budaya Madura

Dari hasil observasi sosial di keempat desa, peneliti menemukan bahwa tembakau bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan telah menjadi bagian dari sistem nilai dan identitas budaya masyarakat. Ritual pertanian dari masa tanam hingga panen sarat dengan simbol-simbol religius dan tradisi turun-temurun. Pesta panen, misalnya, bukan hanya bentuk syukur, tetapi juga sarana penegasan status sosial sebagai “petani tembakau sukses.” Tekanan sosial untuk tetap menanam tembakau menjadi sangat kuat, bahkan ketika keuntungan ekonomi semakin menurun.

Bersama seorang tokoh masyarakat Desa Panglegur beliau sekaligus Wakil Ketua DPRD kabupaten Pamekasan, peneliti menanyakan: “Mengapa masyarakat di daerah ini tetap mempertahankan usaha tembakau meskipun hasil ekonominya semakin tidak stabil? Apakah faktor budaya memengaruhi pilihan tersebut?” Beliau menjawab:

“Masyarakat di sini, sejak muda sudah diajari menanam dan merawat tembakau mulai dari aktivitas tanam seperti menyiram tembakau yang berbeda dengan menyiram tanaman lainnya, bukan diajari bikin usaha online. Jiwa mereka adalah jiwa petani tembakau. Ini warisan leluhur. Dulu, dengan tembakau, kami bisa menyekolahkan anak, membangun rumah. Sekarang mungkin sulit, tapi meninggalkan tembakau dianggap seperti meninggalkan jati diri. Program pemerintah untuk alih komoditas sering gagal karena mereka hanya kasih bibit, tanpa sentuh hati dan budaya kami.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas bertani tembakau memiliki makna simbolik yang kuat sebagai warisan budaya dan identitas sosial. Keterikatan emosional ini menciptakan kondisi *cultural lock-in*, yaitu keterjebakan budaya yang membuat masyarakat sulit keluar dari praktik lama meskipun secara ekonomi tidak lagi menguntungkan. Dengan demikian, program diversifikasi pertanian sering kali gagal bukan karena lemahnya teknologi atau akses pasar, melainkan karena tidak adanya pendekatan kultural yang mampu mengubah persepsi dan nilai sosial yang melekat pada tembakau.

Hasil observasi peneliti di beberapa kegiatan masyarakat, seperti tradisi Koloman Bhekoh (Gotong royong panen tembakau), memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya tersebut diinternalisasi secara kolektif. Fenomena ini memperkuat temuan bahwa bagi petani Madura, meninggalkan tembakau berarti kehilangan makna eksistensial, bukan sekadar kehilangan sumber pendapatan.

Kebijakan Pemerintah dan kesejahteraan Petani Tembakau

Observasi terhadap implementasi kebijakan di tingkat desa menunjukkan adanya kesenjangan besar antara desain kebijakan di atas kertas dengan realitas di lapangan. Di beberapa balai desa, terpampang spanduk sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), namun hasil fisik bantuan tersebut tidak tampak nyata di lahan petani kecil. Sementara itu, proses distribusi pupuk bersubsidi tampak tidak transparan dan sering kali diwarnai hubungan patronase dengan aparat desa.

Bersama seorang petani Desa Tlanakan, peneliti mengajukan pertanyaan: “Apakah Bapak pernah merasakan manfaat langsung dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) atau bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah?” Ia menjawab:

“Jangankan mendapatkan bantuan dana, kabar tentang dana bagi hasil cukai saja kami tidak tau. Untuk biaya dan modal dalam bertani tembakau ini, di dapatkan dari hasil tabungan dan ngutang sama saudara, jadi tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah. Dengan biaya sekitar +- 36 Juta ini masih belum masuk biaya panen, itu dari hasil istri mengumpulkan seribu dua ribu setiap harinya, dan ngutang sama saudara saya.”

Kutipan di atas menunjukkan asimetri dalam distribusi kebijakan publik yang berdampak langsung pada ketimpangan ekonomi petani. Kegagalan dalam menyalurkan DBHCHT secara merata memperlihatkan lemahnya mekanisme akuntabilitas pemerintah lokal. Selain itu, praktik patronase dalam distribusi pupuk memperkuat ketimpangan sosial dan mengurangi keadilan akses terhadap sumber produksi pertanian.

Observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah untuk petani tembakau, disamping tidak mendapatkan DBHCHT petani

tembakau juga tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, karena tanaman tembakau tidak masuk pada komoditas tanaman yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan keputusan Dirjen Sarpras pertanian Nomor 45.11/kpts/RC.210/B/11/2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023. Fakta-fakta ini mempertegas bahwa kebijakan fiskal berbasis tembakau dan dana hasil cukai tembakau belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar petani kecil.

Kerentanan di Tengah Ladang yang Hijau

Pada observasi lapangan di Desa Sama Waru, peneliti menyaksikan kondisi tanaman tembakau yang rusak akibat anomali iklim yang sudah masuk musim hujan. Daun yang seharusnya berwarna hijau kekuningan tampak berlubang, bercak hitam, dan tipis. Petani tetap melakukan panen meskipun hasilnya tidak memenuhi standar kualitas, yang secara otomatis menjatuhkan harga jual di pasaran.

Bersama seorang petani Desa Sama Waru, peneliti mengajukan pertanyaan: “Bagaimana kondisi hasil panen tembakau tahun ini, terutama dalam menghadapi perubahan cuaca atau serangan hama?” Dengan wajah lesu, ia menjawab:

“Musim ini saja, karena hujan terus menerus di musim panen, hasil saya turun. Daun yang seharusnya kualitas satu, jadi kualitas tiga. Harganya anjlok dari Rp 60.000 per kilo jadi Rp 30.000 bahkan ada yang 20.000. Semua perhitungan modal dan harapan untung langsung habis. Kami tidak punya asuransi, tidak ada cadangan dana. Yang ada hanya hutang yang harus dilunasi. Rasanya seperti bekerja setahun penuh, tetapi akhirnya hanya untuk menambah beban.”

Kutipan ini menggambarkan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi akibat absennya perlindungan sosial bagi petani tembakau. Ketergantungan terhadap kondisi alam tanpa dukungan kebijakan mitigasi risiko menjadikan kegiatan bertani sebagai praktik ekonomi berisiko tinggi. Tidak adanya skema asuransi pertanian atau dana darurat bencana memperparah kondisi ekonomi keluarga petani saat menghadapi gagal panen.

Hasil observasi lapangan memperkuat hal ini. Daun tembakau banyak yang rusak, hasil panen menumpuk tanpa pembeli, dan beberapa petani terpaksa menjual daun dengan harga di bawah biaya produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kehadiran negara melalui kebijakan perlindungan dan adaptasi iklim, pertanian tembakau di Pamekasan akan terus berada dalam posisi ekonomi yang rapuh dan tidak berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Paradok antara Kesejahteraan dan Produktivitas Tinggi

Berdasarkan kerangka metodologis yang telah ditetapkan, pembahasan hasil penelitian ini akan dianalisis melalui integrasi tiga perspektif teoritis Teori Kesejahteraan, Sustainable Livelihood Framework (SLF), dan Ekonomi Politik Agraria untuk menjawab paradoks utama dalam penelitian, yaitu tingginya produktivitas tembakau yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Pamekasan.

Dari perspektif Teori Kesejahteraan, temuan penelitian di empat desa menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan petani tembakau Pamekasan berada pada tingkat yang memprihatinkan. Narasi petani, seperti yang diungkapkan Bapak Juara dari Bujur Tengah mengenai ketiadaan pilihan dalam penentuan harga, dan keluhan petani di Waru barat tentang kerugian akibat anomali iklim, mengonfirmasi bahwa kesejahteraan tidak dapat diukur semata dari volume produksi. Stabilitas pendapatan, sebagai salah satu pilar kesejahteraan, benar-benar tidak terwujud. Fluktuasi harga yang drastis, dari Rp 60.000 menjadi Rp 30.000 bahkan ada yang 20.000 per kilo, dan ketidakmampuan mengatasi guncangan ekonomi akibat biaya produksi yang membengkak, menjadikan pendapatan petani sangat volatil dan tidak dapat diprediksi. Disamping itu akses terhadap input

produksi yang tidak setara, seperti yang terlihat dalam distribusi pupuk bersubsidi yang diskriminatif, semakin menggerogoti profitabilitas usaha tani. Dengan demikian, kerangka Teori Kesejahteraan berhasil membongkar ilusi produktivitas dengan menunjukkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi multidimensi yang justru rapuh di tingkat petani Pamekasan.

Konfigurasi Modal yang Tidak Seimbang dan Jerat Livelihood

Analisis menggunakan Sustainable Livelihood Framework (SLF) mengungkap konfigurasi kelima modal petani yang tidak seimbang, yang menjelaskan mengapa mereka terjebak dalam komoditas yang rentan.

- a) Modal Sosial yang seharusnya menjadi sumber kekuatan, justru berubah menjadi jebakan. Jaringan dengan tengkulak, yang semula dimaksudkan untuk memastikan penyerapan hasil panen, ternyata merupakan hubungan patron-klien yang bersifat eksploitatif dan memperlemah daya tawar.
- b) Modal Manusia terbatas hanya pada pengetahuan budidaya tembakau yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini, seperti diungkapkan tokoh masyarakat Panglegur, menciptakan *skill lock-in* yang menyulitkan diversifikasi penghidupan.
- c) Modal Finansial hampir tidak ada karena margin keuntungan yang tipis langsung habis untuk konsumsi dan pelunasan utang, sehingga tidak ada tabungan untuk menanggung risiko.
- d) Modal Alam, meskipun luas areal tanam meningkat, menghadapi ancaman serius dari degradasi kualitas lahan dan anomali iklim yang berubah dari musim kemarau ke musim hujan.

Konfigurasi yang timpang inilah yang menciptakan *vulnerability context* yang tinggi. Strategi penghidupan (*livelihood strategy*) yang terpusat pada tembakau bukanlah pilihan rasional semata, melainkan konsekuensi dari struktur modal yang terikat (*asset tangibility*) dan diperkuat oleh nilai-nilai kultural. SLF dengan demikian berhasil memetakan bagaimana kerentanan tersebut dibentuk dan dipertahankan pada level rumah tangga.

Struktur Kekuasaan dan Politik sebagai Akar Masalah

Perspektif Ekonomi Politik Agraria berfungsi sebagai payung analitis yang menyatukan temuan di tingkat mikro (kesejahteraan dan livelihood) dengan struktur makro yang menindas. Analisis ini membuktikan bahwa paradoks Pamekasan bukanlah kesalahan individual petani, melainkan buah dari struktur ekonomi politik yang timpang.

- a) Struktur Pasar yang Oligopsonistik: Dominasi tengkulak, seperti yang terobservasi dalam proses penyerapan hasil tani tembakau, adalah manifestasi dari kegagalan negara dalam menciptakan pasar yang kompetitif dan adil. Struktur ini memastikan bahwa nilai ekonomi terbesar dari komoditas tembakau tidak mengalir ke produsen primer, melainkan terakumulasi di para pedagang perantara.
- b) Kebijakan Fiskal yang Tidak Pro-Petani: tidak sampainya dana DBHCHT terhadap petani menunjukkan kegagalan distribusi. Dana yang seharusnya menjadi instrumen redistribusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani justru tidak sampai ke sasaran. Hal ini merefleksikan lemahnya akuntabilitas pemerintahan lokal dan absennya partisipasi petani dalam perencanaan kebijakan.
- c) Kebijakan Input yang Eksklusif: Distorsi dalam distribusi pupuk bersubsidi merupakan bentuk dari patronase politik yang tidak menyediakan ruang

pupuk bersubsidi untuk di distribusikan kepada petani tembakau menyebabkan biaya operasional dan modal finansial dalam bertani tembakau yang semakin bengkak. Kebijakan ini gagal menjalankan fungsinya sebagai jaminan akses publik dan justru mereproduksi ketimpangan di tingkat akar rumput.

- d) Hegemoni Budaya sebagai Alat Resistensi Pasif: Faktor budaya, yang di satu sisi merupakan identitas, di sisi lain berfungsi sebagai alat yang melanggengkan status quo. Nilai-nilai tradisi yang kuat, seperti yang dijelaskan tokoh Panglegur, menciptakan *cultural lock-in* yang membuat petani sulit menerima perubahan dan pada akhirnya melindungi struktur agraria yang existing beserta para aktor yang diuntungkan di dalamnya.

Secara integratif pembahasan ini menyimpulkan bahwa tingginya produksi tembakau tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan karena manfaat ekonominya terhambat oleh struktur kebijakan dan relasi kuasa yang timpang. Teori Kesejahteraan mengungkap gejala rapuhnya kesejahteraan, SLF memetakan kerentanan pada level rumah tangga, dan Ekonomi Politik Agraria menelusuri akar masalahnya hingga pada struktur kekuasaan dan kebijakan yang tidak adil. Ketergantungan pada tengkulak, kegagalan distribusi DBHCHT, dan distorsi akses pupuk adalah mata rantai dalam sebuah sistem yang secara sistematis meminggirkan petani kecil. Sementara itu, kekuatan budaya yang mengakar justru dimanfaatkan secara tidak langsung untuk mempertahankan sistem yang tidak berkelanjutan ini. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat transformatif, tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga mereformasi struktur kebijakan, politik, dan pendekatan budaya yang selama ini menjadi akar dari paradoks Pamekasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks antara meningkatnya produktivitas tembakau dan stagnasi kesejahteraan petani di Pamekasan merupakan akibat dari struktur ekonomi politik agraria yang timpang. Peningkatan luas tanam dan produksi tidak menghasilkan manfaat ekonomi bagi rumah tangga petani karena aliran nilai dikuasai oleh pasar oligopsonistik yang didominasi tengkulak, tata kelola DBHCHT yang tidak efektif, dan distribusi input produksi yang diskriminatif. Kerentanan tersebut diperkuat oleh faktor sosial-budaya yang menciptakan *cultural lock-in*, sehingga strategi penghidupan petani tetap terpusat pada tembakau meskipun modal yang dimiliki terbatas. Analisis SLF menunjukkan bahwa pilihan ekonomi petani lebih dipengaruhi oleh struktur kesempatan yang sempit dibanding pertimbangan rasional. Oleh sebab itu, penyelesaian paradoks ini memerlukan reformasi kebijakan yang transformatif melalui penguatan kelembagaan petani, tata kelola fiskal yang transparan dan partisipatif, serta diversifikasi ekonomi yang sensitif terhadap konteks budaya. Pendekatan multidimensi yang menyentuh akar masalah struktural dan kultural menjadi prasyarat bagi terwujudnya pembangunan sektor tembakau yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Saktisyahputra, S., Purnamasari, R., Ningrum, W. S., & Mayasari, M. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=b_T-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=BUKU+METODE+PENELITIAN+KUALITATIF&ots=yzl6qrfJ82&sig=Y8kjQBKQ6vnHKFAktkJ6wE9vvKo
- Alaslan, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Center for Open Science. <https://ideas.repec.org/p/osf/thesis/smrhb.html>
- Bahri, Z., & Aprilianti, V. (2023). *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka.
- Fitria, E. A., Utama, A. D., Suhendra, D., Harahap, E. J., P, P. R. S., Karina, I., Aisyah, S., Mustamu, N. E., & Rahman, A. (2024). *Pertanian Berkelanjutan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hariyono. (2024). *Ekonomi Makro: Kunci Menuju Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat*. Deepublish.
- Hayati, M., & Maisaroh, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Pemilihan Komoditas (Studi Kasus Pada Tanaman Tembakau dan Padi Di Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(2), 84–92. <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6276>
- Hidayat, N., & Arifah, H. K. N. (2023). *DETERMINAN PRODUKSI TEMBAKAU PADA LAHAN TEGAL DAN LAHAN GUNUNG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan)*. 07(02).
- Ketaren, A., & Rangkuty, R. P. (2021). Kajian Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/10.29103/jspm.v2i2.5646>
- Parmawati, R., Putra, F., Sunaryo, Wike, & Hardyansah, R. (2021). *Sustainable Livelihood Approach: Mendorong Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Rachman, N. F. (2017). *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. INSISTPress.
- Siagian, V. J. (2024). *OUTLOOK KOMODITAS PERKEBUNAN TEMBAKAU 2024*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Tembakau_F.pdf